

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktifitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Yang berarti dalam pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto dan Yulia, 2009).

Hal tersebut ditandai dengan semakin besarnya kewenangan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang juga di iringi dengan meningkatnya pendanaan dari pusat ke daerah dalam rangka meyelenggarakan kegiatan pelayanan publik tersebut. Anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi cakupan jenis dana yang didaerahkan maupun dari alokasi dana. Belanja daerah tentu saja diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka merujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap pemerintah daerah perlu menyusun prioritas belanja modal dan perencanaan yang baik sehingga dapat menjadi kunci untuk menyiasati kendala yang dihadapi. Selain itu dari sisi pemerintah pusat, perlu juga memberikan rekomendasi pada internal pemerintah pusat mengenai perbaikan kebijakan transfer ke daerah untuk mempercepat realisasi belanja modal di daerah. Terkait dengan hal tersebut, kiranya perlu dilakukan analisis tentang monitoring dan evaluasi belanja modal daerah yang mampu diberikan gambaran mengenai tata kelola terhadap belanja modal daerah yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat (www.djpk.depkeu.go.id).

Dalam proses penyusunan anggaran terjadi hubungan keagenan antar eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal. Kedudukan eksekutif yang lebih rendah dari legislatif membuat eksekutif

sulit menolak usulan legislatif dalam mengalokasikan sumber daya yang memberikan keuntungan kepada legislatif, sehingga menyebabkan outcome anggaran dalam bentuk layanan publik mengalami distorsi dan merugikan publik (Setyorini, 2012).

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-seharnya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh terhadap tingkat produktifitasnya yang akan semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan (Maryati dan Ulfi, 2013).

Menurut Halim(2008) pada pemerintah, perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

Berlakunya undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan dan keuangan pusat daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan daerah. UU ini menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana

perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah (Setyorini, 2012).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2012”**.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011-2012 dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2012?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2012?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2012?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2012.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2012.

3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2012.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan masukan baik bagi Pemerintah pusat daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD.

2. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang diperoleh, serta menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian.

3. Bagi Dunia Pendidikan

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya

masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian serta menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait, menggambarkan kerangka konseptual dan menarik hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil dari analisis pengujian hipotesis dan pembahasannya serta hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menggambarkan tentang kesimpulan atas pembahasan masalah, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa dimasa yang akan datang.